

**SKRIPSI**  
**PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN TERPADU**  
**DI KOTA BAUBAU**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik**  
**Pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**OLEH**

**MUHAMMAD SYAWAL**

**E111 15 305**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN TERPADU**

**DI KOTA BAUBAU**

Di susun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD SYAWAL**

**E111 15 305**

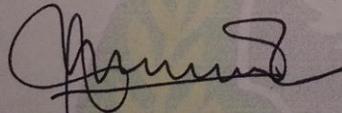
Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji sidang skripsi

Pada tanggal : 01 Agustus 2022

**Menyetujui,**

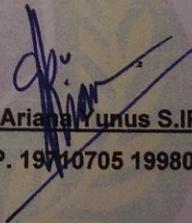
**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**

**NIP. 19651109 19103 1008**



**Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si**

**NIP. 19710705 199803 2002**

**Mengetahui,**

**Ketua Departemenn Ilmu Politik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS**



**Drs. H. A. Yakub, M.Si. P.hD**

**NIP. 1962123 1199003 1023**

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN TERPADU**

**DI KOTA BAUBAU**

Di susun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD SYAWAL**

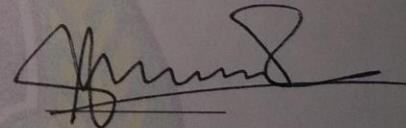
**E 111 15 305**

Telah diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat oleh panitia Ujian  
Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik  
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,  
Tim Penguji :**

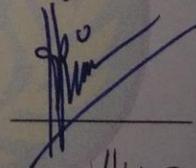
Ketua :

Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si



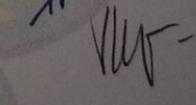
Sekretaris :

Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si

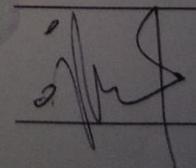


Anggota :

Dr. Muhammad Saad, MA



Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syawal

NIM : E11115305

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang Pendidikan : Strata – 1 (S1)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Di Kota Baubau”** merupakan karya orisinal saya dan sepanjang pengetahuan saya tidak memuat bahan yang pernah dipublikasi atau telah ditulis oleh orang lain dalam rangka tugas akhir untuk suatu gelar akademik di Universitas Hasanuddin. atau di lembaga pendidikan tinggi lainnya di manapun; kecuali bagian yang telah dikutip sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.

Adabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Saya juga menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan dalam batas tertentu dibantu oleh pihak pembimbing.

Makassar, 01 Agustus 2022



*Syawal*

Muhammad Syawal

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alamin.* Untaian rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat, hidayah dan anugerah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, beserta orang-orang yang tetap setia meniti jalannya sampai akhir zaman.

Skripsi dengan judul **“Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Di Kota Baubau”**, disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Namun atas bantuan dan bimbingan serta kerja sama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat penulis rampungkan. Karenanya dari lubuk hati terdalam perkenankanlah penulis menghanturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya Ayahanda **La pohio** dan Ibunda **Mariani** yang tak terhingga atas segala jerih payahnya selama ini yang telah membesarkan, mencurahkan, mendoakan dan berupaya membiayai pendidikan penulis untuk menyelesaikan studinya. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* selalu

melindungi dan memberi ampunan kepada Ayah dan Ibu, rasa .bangga kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang senantiasa memberikannya dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih penulis haturkan dari lubuk hati terdalam kepada bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.** selaku **Pembimbing Utama** dan **Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.** selaku **Pembimbing Pendamping** sekaligus penasehat akademik bagi penulis. Terima kasih karena telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanudduin Makassar beserta jajarannya.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

3. Drs. A. Yakub, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Haryanto, S.IP., MA. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data sampai pada penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman DELEGASI 2015 yang telah memberi semangat satu sama lain dan selalu bertanya perkembangan skripsi penulis.
8. Teman-teman satu posko KKN Reguler di Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Sinoa Desa Bonto Karaeng, .Fadel, Reza, Takbir, Pian, Andin, Ayu, Yunita, Dhya, dan .Ainun yang memberi banyak pengalaman, pembelajaran dan menjadi keluarga kedua setelah keluarga kandung. Dimana keseruan, suka-duka yang dilewati bersama, saling membagi pengalaman dan ilmu bersama.

9. Untuk seorang wanita yang pasti saya halalkan yang membuat saya untuk terus termovasi dan semangat, dimana sebelumnya sudah menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga amal baik yang diberikan kepada penyusun mendapat imbalan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memiliki guna dan manfaat bagi penulis khususnya dan semua yang membutuhkan.

Makassar, 01 Agustus 2022.

Penulis,

Muhammad Syawal  
NIM : E11115305

## ABSTRAK

**Muhammad syawal, NIM E 111 15 305, dengan judul “Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Di Kota Baubau”. Di bawah bimbingan Armin Arsyad selaku Pembimbing Utama dan Ariana Yunus selaku Pembimbing Pendamping.**

Mendorong agar Kota Baubau segera dikembangkan menjadi kawasan industri terutama di sektor perikanan dengan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan yang melimpah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah Kota Baubau dalam pengembangan kawasan industri perikanan terpadu di Kota Baubau. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata dengan menggunakan teori desentralisasi untuk menganalisis peran pemerintah dalam mewujudkan kawasan industri perikanan terpadu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kota Baubau dalam pengembangan kawasan industri perikanan terpadu terbilang sangat besar. *Pertama*, telah menyiapkan lahan 3 hektar, dua jalur masuk, dan dermaga sebagai aktivitas bogkar muat hasil tangkapan. *Kedua*, karena penetapan lokasi kawasan industri perikanan berada di bawah pemerintah provinsi, maka langkah yang dilakukan pemerintah daerah Kota Baubau adalah terlebih dahulu melakukan audiensi dengan Kementerian KKP untuk mencari dukungan. Olehnya itu dalam pertemuan dengan DKP Prov. Sultra menghasilkan bahwa kebijakan ini akan diusulkan dalam Perda Provinsi Sultra tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

**Kata Kunci** : Desentralisasi, kawasan Industri Perikanan, Kota Baubau.

## ABSTRACT

**Muhammad syawal, NIM E 111 15 305, with the title "Development of an Integrated Fisheries Industrial Estate in Baubau City". Under the guidance of Armin Arsyad as the Main Advisor and Ariana Yunus as the Advisor.**

Encourage Baubau City to be immediately developed into an industrial area, especially in the fisheries sector by utilizing the potential of abundant fisheries resources.

This study aims to describe and analyze the role of the local government of Baubau City in the development of an integrated fishing industry area in Baubau City. Qualitative analysis technique is data analysis based on words using decentralization theory to analyze the government's role in realizing an integrated fishing industry area.

The results of the study indicate that the role of the local government of Baubau City in the development of the integrated fishing industry area is quite large. First, it has prepared 3 hectares of land, two entrance lanes, and a dock as a loading and unloading activity for the catch. Second, because the determination of the location of the fishing industry area is under the provincial government, the steps taken by the local government of Baubau City are to first conduct an audition with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to seek support. Therefore, in a meeting with DKP Prov. Southeast Sulawesi resulted that this policy would be proposed in the Southeast Sulawesi Provincial Regulation on Zoning Plans for Coastal Areas and Small Islands.

**Keywords:** Keywords: Decentralization, Fishery Industry area, Baubau City.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTARCT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah . .....	8
1.3 Tujuan penelitian .....	8
1.4 Manfaat Peneliatian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Desentralisasi .....	10
2.2 Konsep Kawasan Industri .....	13

2.3 Konsep Pelabuhan Perikanan .....	15
2.4 Kerangka Pemikiran .....	20

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi Penelitian .....	21
3.2 Metode dan Tipe Penelitian .....	21
3.3 Sumber Data Penelitian .....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.5 Teknik Analisis Data .....	24

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Baubau .....	26
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Baubau .....	26
4.1.2 Keadaan Geografis .....	28
4.1.3 Keadaan Sosial Dan Ekonomi . .....	32
4.2 Gambaran Umum Industri Perikanan Tangkap .....	39
4.2.1 Profil Perikanan Tangkap Kota Baubau .....	39
4.2.2 Nelayan .....	41
4.2.3 Pedagang Pengumpul Ikan .....	42
4.2.4 Pedagang Ikan Papalele .....	43
4.2.5 Penjual Ikan .....	44
4.2.6 Infrastruktur dan Transportasi .....	45

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Peran Pemerintah Daerah Kota Baubau Dalam Pengembangan industri perikanan .....	48
5.1.1 Peran Pemerintah Daerah Kota Baubau Dalam Menyiapkan Fasilitas .....	50
5.1.1.1. Fasilitas Yang Telah Terealisasi .....	50
a. Lahan .....	50
b. Dermaga .....	53
c. Jalan Masuk Lokasi .....	56
5.1.1.2. Fasilitas Yang Belum Terealisasi .....	57
a. Pengadaan Alat Cold Storage .....	57
b. Gedung Informasi .....	67
c. Wisata Perikanan.....	69
5.1.2 Peran Pemerintah Daerah Kota Baubau Dalam Melakukan Komunikasi .....	71
5.2 Analisis Peran Pemerintah Daerah Kota Baubau Dalam Pengembangan industri perikanan .....	74

## **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	81
6.2 Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA ..... 83**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 86**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	4
Tabel 4.1 .....	31
Tabel 4.2 .....	32
Tabel 4.3 .....	34
Tabel 4.4 .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	20
Gambar 4.1 .....	30
Gambar 4.2 .....	40
Gambar 5.1 .....	51
Gambar 5.2 .....	54
Gambar 5.3 .....	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara kepulauan adalah salah satu Negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta, kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan, yaitu dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta, kaya akan sumber daya laut dan ikan. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Diseminasi Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan (SIDATIK), Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2020 sebanyak 7.751.480,00 ton. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, potensi ikan tangkap di Indonesia mencapai 12,01 juta ton berdasarkan kajian estimasi potensi Sumber Daya Ikan (SDI). Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber

---

<sup>1</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hlm. 2.

Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Estimasi itu dihitung di total 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Besarnya potensi perikanan yang dimiliki laut Indonesia dapat menjadikan sebagai kekuatan utama sebagai penghasil dan distributor hasil perikanan diseluruh dunia. Maka sangat diperlukan cara pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Karena dalam industri perikanan merupakan sesuatu yang kompleks mulai dari aktivitas menangkap, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk perikanan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional hal tersebut.

Untuk itu perlu adanya suatu kawasan yang menjadi pusat semua aktivitas kegiatan industri perikanan, yang dikenal dengan nama pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Karena Indonesia menganut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang yang luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian wewenang yang luas terhadap daerah otonom diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, keistimewaan, serta potensi keaneka ragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesai.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan menjelaskan bahwa pemerintah daerah kota/kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan kawasan industri perikanan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Pemerintah daerah kota/kabupaten hanya dapat memberikan rekomendasi dimana lokasi tempat yang layak untuk dijadikan sebagai kawasan industri perikanan terpadu kepada pemerintah provinsi.

Lokasi yang menjadi penelitian pada skripsi ini adalah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Daerah yang memiliki wilayah strategis dan potensial dalam pengembangan industri perikanan. Diharapkan dapat menjadi salah satu daerah sebagai pemasok utama dalam distribusi komoditas hasil perikanan untuk daerah-daerah yang lain.

Kota Baubau terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Tenggara yang berupa wilayah kepulauan. Berada di Pulau Buton, terletak pada 5<sup>0</sup> 21'–5<sup>0</sup> 30' LS dan diantara 122<sup>0</sup> 30'–122<sup>0</sup> 45' BT. Kota Baubau terdiri dari 8 (delapan), yaitu Kecamatan Wolio, Kecamatan Betoambari, Kecamatan Batupoari, Kecamatan Kokalukuna, Kecamatan Lea-Lea, Kecamatan Murhum dan Kecamatan Sorawolio.

Walaupun Kota Baubau tidak memiliki wilayah perairan laut yang luas. Namun, letaknya yang strategis berada perairan Buton dan Wakatobi, serta berada diantara laut Flores (wilayah pengelolaan perikanan (WPP)–713) dan laut Banda (WPP–714) tergolong sebagai 2 wilayah laut dengan potensi berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan 2 juta ton/tahun. Ini kekayaan sumber daya ikan yang sangat besar di perairan laut Indonesia.

Berdasarkan data lima tahun terakhir jumlah produksi perikanan tangkap Kota Buabau ta.hun 2016-2020 terus meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Produksi Perikanan Tangkap Kota Baubau 5 Tahun Terakhir**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>
1	2016	9.907,13
2	2017	11.673,22

3	2018	13.432,06
4	2019	14.036,65
5	2020	14.608,59

Sumber : Dinas Perikanan Kota Baubau Tahun 2021

Jumlah produksi hasil tangkapan Kota Baubau tiap tahun mengalami peningkatan. Meski tiap tahun mengalami peningkatan tetapi jumlah ini tergolong masih kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Jumlah produksi tangkapan terus mengalami peningkatan tetapi harus dibarengi dengan fasilitas operasional pasca tangkap yang dapat dikelola dengan baik agar mutu hasil tangkapan tetap terjaga kualitasnya.

Kota Baubau sendiri semua aktivitas industri perikanan terpusat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Wameo yang mulai beroperasi sejak tahun 2007 dengan fasilitas, yakni Tempat Pelelangan Ikan (TPI), cold storage (gudang pendingin), *Air Blast Freezer* (ABF) (gudang pembekuan), prabik es, pelabuhan, dan SPBU.

Aktivitas yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Wameo ini tidak selalu berjalan lancar. Ada beberapa hambatan dalam yang terjadi terutama pada fasilitas cold storage (gudang pendingin) yang jumlah kapasitas daya tampungnya terbatas. Ditambah lagi pada bulan-bulan tertentu jumlah hasil tangkapan nelayan melimpah. Dampak buruknya yaitu ikan-ikan yang tidak dapat tertampung harus menunggu dan dapat membuat

kualitas ikan akan menurun atau menjual dengan harga yang rendah pastinya membuat nelayan atau pengumpul ikan akan mengalami kerugian. Inilah salah satu yang menghambat perkembangan industri perikanan di Kota Baubau.

Saat ini alat cold storage di PPI Wameo terdapat 2 gudang dengan kapasitas daya tampung 50 ton. Sedangkan untuk tiap *Air Blast Freezer (ABF)* (gudang pembekuan) terdapat 4 gudang masing-masing menampung 5 ton. Akan tetapi dari semua gudang yang ada, tidak semua digunakan. dan beberapa mengalami kerusakan. Dari 2 cold storage yang ada, hanya 1 yang digunakan. Dan dari 4 *Air Blast Freezer (ABF)* yang ada, hanya 1 yang digunakan. Ini hal yang cukup mengkhawatirkan dan bagi pengguna jasa alat ini, beberapa kali saling berebut siapa yang akan didahulukan. Mengingat fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kualitas mutu ikan. Maka diharapkan kedepannya fasilitas-fasilitas tersebut dapat dibangun yang lebih daya tampung yang lebih besar.

Apalagi area di PPI Wameo sudah tidak memungkinkan lagi untuk penambahan pembangunan alat cold storage. Karena area di PPI Wameo sudah sangat terbatas dengan luas lahan 200 m<sup>2</sup>. Itulah mengapa industri perikanan yang ada di Kota Baubau sampai saat ini belum terlalu berkembang. Tetapi, jika melihat Kota Baubau yang dikelilingi dengan laut yang kaya dengan sumber daya ikan dan lokasinya yang sangat strategis

yaitu sebagai jalur pelayaran sekunder penghubung Indonesia barat dan timur, sehingga mempermudah dalam mendistribusikan hasil perikanan di berbagai daerah lainnya di Indonesia maupun di luar negeri.

Tidak ada yang dapat menyelesaikan banyaknya permasalahan di masyarakat, selain pemerintah. Sebab pemerintahlah yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk melakukan kegiatan yang dapat mengatasi semua persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Konstitusi kita hanya mengatakan bahwa untuk menjamin kesejahteraan umum dan memajukan kehidupan bangsa maka dibentuklah pemerintahan Indonesia. Jadi, pemerintahlah yang punya kewenangan membuat kebijakan dalam rangka mengatasi masalah-masalah publik.

Dalam upaya mengatasi masalah dan meningkatkan industri perikanan yang ada di Kota Baubau, pemerintah daerah Kota Baubau telah membuat sebuah agenda mengenai pengembangan kawasan industri perikanan terpadu. Dengan beberapa program yang meliputi: pengadaan alat cold storage, gedung informasi, dan wisata perikanan yang terletak di sepanjang pesisir Kelurahan Wameo, Tarafu, dan Bone-bone.

Olehnya itu, pengelolaan kawasan industri perikanan saat ini di Kota Baubau, sebagaimana yang tertuang dalam Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau tahun 2014-2034. Dengan

adanya pengembangan kawasan industri perikanan dapat menambah fasilitas-fasilitas penguinjang operasional yang ada, sehingga meningkatkan produksi hasil perikanan di Kota Baubau

Pada prinsipnya, apabila sudah terbangun fasilitas yang pendukung dari hulu sampai hilir. Mulai sistem informasi lokasi dan waktu tangkap ikan, pasar yang jelas, alat cold storage yang memadai. sehingga para pengumpul ikan (individu/perusahaan) tidak khawatir lagi membeli ikan dari nelayan dengan jumlah yang besar. Bagi para nelayan akan terpacu untuk menangkap ikan dalam jumlah besar pula, karena sudah jelas pasar dan pembeli. Mekan peningkatan akan terjadi dalam waktu yang cepat.

Berdasarkan dari uraian diatas, terdapat adanya permasalahan dengan industri perikanan di Kota Baubau. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah daerah Kota Baubau dalam mewujudkan kawasan industri perikanan terpadu yang terintegras. Olehnya itu, dengan ini penulis mengusulkan judul penelitian yakni: "**Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Di Kota Baubau**".

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah Kota Baubau dalam pengembangan kawasan industri perikanan terpadu di Kota Baubau?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah Kota Baubau dalam pengembangan kawasan industri perikanan terpadu di Kota Baubau?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

#### **1. Manfaat Akademis**

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat digunakan unruk para akademisi yang sedang dan yang ingin mengguluti lebih jauh program studi ilmu politik.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.

b. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu pra syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini yang akan dibahas ada empat sub-bab yaitu: konsep desentralisasi, konsep kawasan industri, konsep pelabuhan perikanan dan kerangka pemikiran. Keempat hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

#### 2.1 Konsep Desentralisasi

Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri.<sup>2</sup>

Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith dalam prespektif politik dalam Saiman menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authoriy*) yang diserahkan

---

<sup>2</sup> Syamsuddin haris. 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta. LIPPI pres. Hal 52

dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.<sup>3</sup>

Desentralisasi dapat membawa banyak dampak positif terutama bagi daerah yang tertinggal. Mereka dapat mengembangkan daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Daerah akan secara mandiri mengembangkan keunggulannya dalam berbagai aspek. Pada asas Desentralisasi daerah otonom dapat mengurus kebijakannya sendiri sehingga berdampak pada besarnya organ pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini kemudian membuat sistem di dalam pemerintahan menjadi sangat kompleks. Banyaknya struktur organisasi yang dibentuk dalam pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan lemahnya koordinasi.<sup>4</sup>

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut.

---

<sup>3</sup> Saiman .2017. *Politik Perbatasan*. Inteligencia Media: Malang. Hal.29

<sup>4</sup> Josef Riwu Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.Hal 12

Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Otonomi daerah yang termaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi arus besar desentralisasi serta membuka ruang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakannya sebagai upaya pengoptimalan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pembangunan daerah kemudian berjalan seiring dengan meluasnya ruang otonom daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing.

Dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengelola daerahnya secara luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk

---

<sup>5</sup> Syamsuddin haris. 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta. LIPPI pres. Hal 56

meningkatkan sumber daya, kemandirian, dan kemampuan dalam menggali dan mengelola seluruh potensi-potensi yang ada dengan maksimal, guna mempercepat pembangunan daerah.

Dengan diterlaksananya pembangunan daerah, diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat sekaligus merupakan landasan pembangunan nasional. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 ayat (1) disebutkan:

“Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.”

## **2.2 Konsep Kawasan Industri**

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.<sup>6</sup> Kawasan Industri dalam definisi tersebut merupakan tempat berlangsungnya kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

stilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan

---

<sup>6</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Perindustrian* (Bandung, Fokusmedia: 2014), h. 3.

kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanan atas industrial estates. Sebelumnya, pengelompokan industri demikian disebut — lingkungan industrill. Menurut Marsudi Djojodipuro , kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.<sup>7</sup>

Industrialisasi dalam arti luas juga dapat kita pahami sebagai suatu proses —yang tak terelakanll menuju masyarakat industrial untuk mengakrualisasikan segala potensi yang dimiliki suatu masyarakat dalam upayanya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi, industrialisasi bukan sekedar membangun wujud fisik semata, melainkan juga membentuk masyarakat untuk siap menghadapi realitas baru serta mengembangkan seperangkat infrastruktur yang menopang kehidupan industrial yang semakin pelik dan multidimensional.

---

<sup>7</sup> Lanta Kautsar Akromi, —Pengertian Kawasan Industri Makalahll (On-Line), tersedia di: <https://id.scribd.com/document/326691201/Pengertian-Kawasan-Industri-Makalah> (6 Oktober 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dampak ekonomi yang dibawakan oleh lokasi industri di suatu tempat terungkap antara lain dalam bentuk peningkatan produksi, pendapatan dan pengurangan pengangguran. Pengaruh langsung dampak ini pada umumnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi industri tersebut untuk kemudian meluas ke daerah dan bahkan mungkin ke tingkat nasional.<sup>8</sup>

### **2.3 Konsep Pelabuhan Perikanan**

Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu, pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitas sebagai penunjang

---

<sup>8</sup> Marsudi Djodipuro, *Teori Lokasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992), h. 194.

dalam menunjang pemanfaatan produksi pasca panen antara lain mencakup 3 aspek yaitu:

1. Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional.
2. Pembangunan industri baik hulu maupun hilir.
3. Pembangunan masyarakat (perikanan) disekitar pelabuhan perikanan sehingga menjadi lebih kreatif dan dinamis.

Sehingga peranan pelabuhan perikanan sangat penting sekali dalam kegiatan produksi pasca panen. Didalam pembangunan pelabuhan perikanan harus diperhatikan dan diteliti tentang potensi yang ada terutama para nelayan yang menangkap ikan dan yang akan melelang ikan. Jika tujuan diadakannya pelabuhan perikanan tercapai akan sangat bermanfaat sekali, hal ini sesuai dengan fungsi dari pelabuhan perikanan itu sendiri yakni untuk menunjang operasional dalam industry perikanan.

### **2.3.1 Fasilitas Pelabuhan Perikanan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentan Pelabuhan Perikanan, telah dijelaskan dimana fasilitas pelabuhan perikanan adalah berbagai sarana dan prasarana yang terdapat di Pelabuhan Perikanan untuk menunjang operasional pelabuhan. Terdapat beberapa fasilitas pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), meliputi:(Lubis, 2012)

## **A. Fasilitas pokok**

Fasilitas pokok merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan dalam aktivitas di suatu pelabuhan perikanan, dimana fasilitas ini berfungsi untuk menjamin kelancaran dan keamanan kapal pada saat berlayar keluar masuk pelabuhan serta pada saat berlabuh di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas pokok diuraikan sebagai berikut:

1. Dermaga, merupakan tempat untuk kapal berlabuh dan bertambat, bongkar muat hasil tangkapan dan mengisi bahan perbekalan untuk kebutuhan melaut.
2. Kolam Pelabuhan, adalah daerah perairan pelabuhan sebagai yempat untuk masuknya kapal yang akan bersandar di dermaga.
3. Alat Bantu Navigasi, merupakan alat yang memiliki kegunaan untuk: menunjukkan peringatan atau tanda terhadap bahaya yang tersembunyi, memberikan petunjuk supaya kapal bisa berlayar dengan aman, dan memberikan petunjuk sewaktu kapal keluar masuk pelabuhan
4. Pemecah Gelombang, merupakan suatu struktur bangunan kelautan yang memiliki kegunaan khususnya untuk melindungi pantai atau daerah di sekitar pantai terhadap pengaruh dari gelombang laut sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada area pelabuhan perikanan.

## **B. Fasilitas fungsional**

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berguna untuk meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok agar mampu mendukung kegiatan di pelabuhan,. Adapun fasilitas-fasilitas fungsional yang diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitas penanganan hasil tangkapan dan pemasaran, meliputi:
  - a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yakni tempat dimana terjadi pertemuan antara penjual (nelayan) dengan pembeli (pedagang maupun agen perusahaan ikan);
  - b. Fasilitas pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, seperti gedung pengolahan ikan dan tempat penjemuran ikan;
  - c. Pabrik es, tempat untuk memproduksi es untuk mempertahankan mutu ikan pada saat penangkapan ikan dan proses pengangkutan ikan menuju pasar atau pabrik;
  - d. Refrigerasi atau fasilitas pendingin, seperti *cold room*, *cold storage*; fasilitas ini sebagai menjaga kualitas ikan agar tidak cepat membusuk dengan cara membekukan pada suhu tertentu, dan dapat disimpan dengan waktu yang bisa berbulan-bulan lamanya.
  - e. Gedung pemasaran, tempat ini difasilitasi dengan berbagai fasilitas seperti alat sortir, pengepakan, timbangan dan lainnya, yang intinya aalah untuk mempercepat proses pengemasan.

### **C. Fasilitas penunjang**

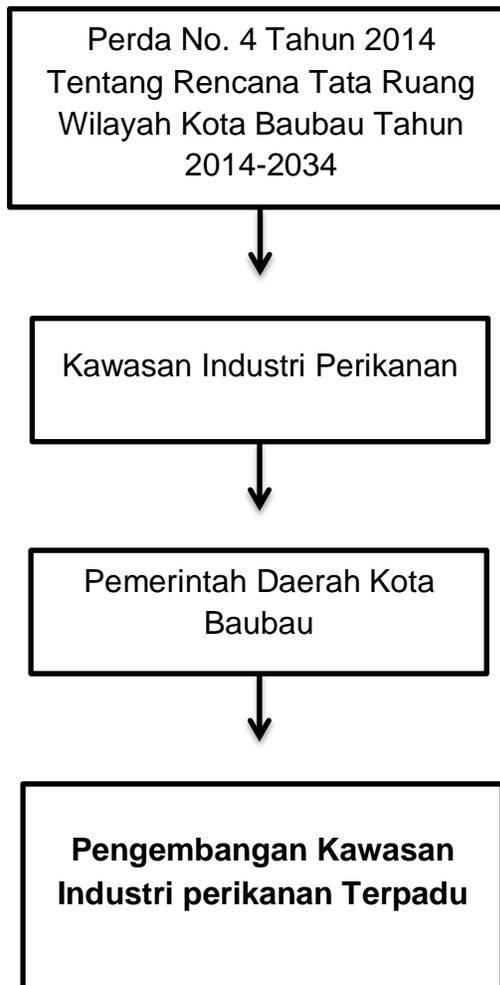
Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara tidak langsung berperan untuk meningkatkan fungsi pelabuhan sehingga para pengguna pelabuhan memperoleh kenyamanan dalam melakukan berbagai kegiatan di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas penunjang diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitas kesejahteraan, yakni poliklinik, MCK, kantin, mess, dan musholla;
2. Fasilitas administrasi, meliputi ruang operator, kantor pengelola pelabuhan, kantor beacukai, kantor syahbandar, dan lain-lain

## 2.4 Kerangka Pemikiran

### PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN TERPADU

#### DI KOTA BAUBAU



Gambar 2.1: Skema pikir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi pemaparan terkait teknis pelaksanaan penelitian. Pada bab ini terdapat aspek-aspek penting yang dibahas, yaitu: lokasi penelitian, metode dan tipe penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Beberapa hal tersebut diuraikan lebih lanjut.

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Baubau, salah satu kota di Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang strategis karena berada di perairan Buton yang kaya akan sumber daya ikan, sehingga memerlukan pengelolaan dan penataan yang baik, dinama jumlah nelayan yang ada di Kota Baubau sebanyak 2.370 orang. Melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Baubau mengenai pengembangan kawasan industri perikanan, diharapkan dapat mempercepat peningkatan industri perikanan Kota Baubau.

#### **3.2 Metode dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata